

THE ACCESIBILITY TO JUSTICE FOR WOMEN AS UNIVERSITY STUDENTS WORKING AS MIGRANT WORKERS WITH REGARDS TO SEXUAL HARASSMENT IN YOGYAKARTA LOCAL CAFES.

Author:

Venesia Rahardjo¹. and Sri Wiyanti Eddyono.²

ABSTRACT

The Special Region of Yogyakarta has always been one of the most populous city filled with university students where the number of the migration has only been increasing in the past years. Align with the growth of businesses in the sector of food and beverages in Yogyakarta, the number of university students working as part-time workers has been increasing. Apart from that, sexual harassment occurring to women has always been a global issue. The combination of the three phenomenon are inter-related to the protection of women who is a gender minority and the protection of migrant workers whom are university students with regards to the safety and security of their rights as the focus of the subject of this research.

The Author used qualitative legal method to help identify the problem of the presented issue, identify the jurisdiction, gather relevant materials, respondent interviews, organising material according to legal philosophy and ideology of the system, map out the possible answer to the problem, analysed the intrinsic value of the legal principles, and form conclusion with the approach of normative-empirical legal case studies.

From this research, it can be concluded that (1) The Indonesian penal code chapter XIV does cover the regulations of sexual harassment but is lacking in definition and creates difficulty to provide material truth while proceeding the case before the court, (2) The involvement of the governmental laws and regulations are not implemented and enacted accordingly for the protection of the victims of sexual harassment by the government institutions, authority and body and (3) The obstacles faced by the victims of sexual harassment in a workplace as university students is that the awareness of the rights and protection of these workers are still not widely spread and is not introduced properly by the company they work for and the implementation of the provision in the world of work mostly covers the measures that will be taken once the incident did occurred and not as a preventive measure.

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (SI IUP 2021).

² Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

Keywords: Yogyakarta, Local Cafes, Migrant Workers, University Students, Victims of Sexual Harassment, Sexual Harassment in Workplace.

AKSESIBILITAS TERHADAP KEADILAN BAGI PEREMPUAN SEBAGAI MAHASISWI YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA MIGRAN TERKAIT PELECEHAN SEKSUAL DI KAFE LOKAL YOGYAKARTA.

Oleh:

Venesia Rahardjo³. dan Sri Wiyanti Eddyono.⁴

INTISARI

Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menjadi salah satu kota terpadat yang dipenuhi mahasiswa di mana jumlah migrasi hanya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan pertumbuhan usaha di sektor makanan dan minuman di Yogyakarta, jumlah mahasiswa yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu semakin meningkat. Selain itu, pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan selalu menjadi isu global. Perpaduan ketiga fenomena tersebut saling terkait dengan perlindungan perempuan yang merupakan minoritas gender dan perlindungan terhadap pekerja migran yang berstatus mahasiswa dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan hak-haknya sebagai fokus subjek penelitian ini.

Penulis menggunakan metode hukum kualitatif untuk membantu mengidentifikasi masalah masalah yang disajikan, mengidentifikasi yurisdiksi, mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, wawancara responden, mengatur bahan menurut filosofi hukum dan ideologi sistem, memetakan kemungkinan jawaban atas masalah, menganalisis nilai intrinsik asas-asas hukum, dan membentuk kesimpulan dengan pendekatan studi kasus hukum normatif-empiris.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) KUHP Indonesia bab XIV memang mengatur tentang pelecehan seksual tetapi kurang dalam definisi dan menimbulkan kesulitan untuk memberikan kebenaran materiil saat melanjutkan kasus di pengadilan, (2) Keterlibatan peraturan perundang-undangan pemerintah tidak dilaksanakan dan diberlakukan sebagaimana mestinya untuk perlindungan korban pelecehan seksual oleh lembaga, otoritas dan badan pemerintah dan (3) Hambatan yang dihadapi oleh korban pelecehan seksual di tempat kerja sebagai mahasiswi adalah kurangnya kesadaran akan hak dan perlindungan para pekerja dan tidak diperkenalkan dengan baik oleh instansi perusahaan dan pelaksanaan ketentuan di dunia kerja sebagian besar mencakup langkah-langkah yang akan diambil setelah kejadian itu sudah terjadi, dan bukan sebagai tindakan pencegahan.

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (SI IUP 2021).

⁴ Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.